
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 7-12

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

Mekanisme Perhitungan Penggunaan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Jihan Khairunnisa

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: jihankhairunnisa180501@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 10, 2023

Revised April 20, 2023

Accepted Mei 30, 2023

Kata Kunci:

Mekanisme, Perhitungan Anggaran, Realisasi Belanja

Keywords:

Mechanisms, Budget Calculations, Expenditure Realization



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Jihan Khairunnisa. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

its realization.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini membahas perhitungan penggunaan anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Dilaksanakan dalam bentuk magang selama kurang lebih satu bulan. Metode pelaksanaan adalah observasi dan wawancara tentang mekanisme kerja perhitungan penggunaan anggaran dan realisasi belanjanya. Hasilnya bahwa kegiatan magang ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat pengetahuan seputar dinas perkebunan dan mekanisme kerja perhitungan penggunaan Anggaran dan realisasinya.

ABSTRACT

This service activity discusses the calculation of budget use and actual expenditure at the South Sumatra Province Plantation Service. It is carried out in the form of an internship for approximately one month. The implementation method is observation and interviews regarding the working mechanism for calculating budget use and actual expenditure. The result is that this internship activity is very beneficial for students. Students gain knowledge about the plantation service and the working mechanism for calculating budget usage and its realization.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam Pasal 23 Ayat (1) mengamanatkan bahwa usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan. Dalam kawasan tersebut seluruh sub system agribisnis perkebunan distimulasi untuk berkembang secara optimal, sinergis dan terintergrasi, sehingga petani pekebun dan para pelaku usaha dalam kawasan tersebut dapat memperoleh manfaat dan nilai tambah yang maksimal secara berkelanjutan.

Pembangunan sub sektor perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian yang terus meningkat, seiringi dengan peningkatan produksi dan kualitas hasil, perkembangan dan pertumbuhan kawasan dan ekonomi di wilayah sentra perkebunan/pedesaan yang sekaligus positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Kondisi ini menggambarkan bahwa peranan pembangunan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekonomi pedesaan dan pertumbuhan kawasan baru yang berbasis komoditas perkebunan.

Reorientasi Pembangunan Perkebunan Nasional tehadap pembangunan ekonomi masyarakat dipedesaan, hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya produksi dan

produktifitas, perluasan areal, penguatan hak atas tanah, pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Mengingat diera globalisasi tuntutan pasar dunia menjadi demikian penting untuk diperhatikan, bukan saja mutu produk yang dihasilkan melainkan pembangunan berwawasan lingkungan justru menjadi perhatian Negara-negara konsumen, oleh karenanya dalam merencanakan pemanfaatan ruang suatu kawasan perlu dikaji dan ditelaah beberapa aspek baik teknis maupun non teknis dari kawasan yang bersangkutan. Hal ini sangat penting, mengingat dalam penataan kawasan akan dilakukan alokasi serta penetapan suatu kegiatan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang ditimbulkan oleh elemen-elemen kegiatan dalam suatu proses yang kontinyu, seperti pertumbuhan fisik kawasan sering kali tidak seimbang dengan perkembangan kawasan adanya perbedaan daya tampung fisik kawasan yang terbatas dengan pertumbuhan kawasan itu sendiri.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berupa magang yang diadakan oleh Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai 22 September 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal, pengalaman kerja, dan kesiapan semua, khususnya setika selesai melaksanakan studi dan terjun ke dunia kerja. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah observasi, wawancara atau interview di tempat magang dengan berbagai stakeholders, dan menyerap berbagai pengalaman secara langsung, dan hasilnya di buat dalam bentuk laporan.

Hasil dan Pembahasan

1. Selayang Pandang Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan kegiatan magang menghasilkan pengetahuan dan pengalaman tentang seputar Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/ badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan diluar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut usaha perkebunan rakyat.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan Pembangunan Perkebunan tersebut dapat dilihat dalam periode tiga tahun terakhir ini luas areal perkebunan rakyat terus meningkat dengan rincian luas areal Tahun 2012 seluas 2.429.132 ha, tahun 2013 menjadi 2.542.801 Ha, dan pada tahun 2014 seluas 2.620.992 ha, umumnya komoditi yang diusahakan tanaman karet, kelapa sawit, Kopi, Kelapa dan komoditi harapan lainnya. Produksi perkebunan pun mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir dengan rincian total produksi perkebunan Tahun 2012 sebesar 3.561.990 Ton, Tahun 2013 sebesar 3.845.982 Ton, dan tahun 2014 sebesar 4.114.840 Ton,. Bahkan menurut data yang dirilis oleh Analis Tim Statistik Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan merupakan Produsen Karet Terbesar di Indonesia di ikuti oleh Sumatera Utara dan Riau. Dari total produksi karet di Indonesia, 20 % produksi tersebut dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Laju produksi ini masih bisa ditingkatkan karena produktivitas komoditi di Sumatera selatan masih dibawa rata-rata. Rendahnya produktivitas dan mutu hasil ini disebabkan belum sepenuhnya di terapkan sistem budidaya yang baik (Good Agriculture

Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 7-12

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

Practices/GAP), penggunaan bibit unggul yang masih rendah, belum sepenuhnya penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit serta rendahnya teknik penyadapan dan pengolahan hasil. Disisi lain banyaknya tanaman karet yang tua/rusak yang perlu segera diremajakan mencapai 143.192 Ha sehingga mempengaruhi produktivitas tanaman karet.

Sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang perkebunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tugas pokok Dinas perkebunan :

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas

Dekonsentrasi di bidang perkebunan

Serta mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b) Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perkebunan;
- c) Melaksanakan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d) Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- e) Pembinaan, pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f) Penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- g) Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
- h) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai standar mutu benih yang ada dan mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan mutu benih perkebunan
 - b) Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan
 - c) Penyiapan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih berdasarkan standar teknis yang ada.
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu

tanaman pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agensia hayati dan pestisida nabati dan mempunyai fungsi :

- a) Pengidentifikasi, penginventarisasi dan penetapan status organisme pengganggu tanaman
- b) Pengujian laboratorium dan pengujian lapangan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- c) Pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agensia hayati dan pestisida nabati.
- d) Pengujian penentuan ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat organisme pengganggu tanaman
- e) Pengembangan metode pengendalian secara terpadu organisme pengganggu tanaman
- f) Pelatihan dan kursus bagi petugas dan kontak tani serta regu proteksi tanaman.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 telah ditetapkan program kerja atau yang dikenal dengan RKT/ Rencana Kerja Tahunan dan telah disinkronkan dengan Rencana Strategis Daerah serta RPJM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 serta diaplikasikan dalam Permendagni No.13 tahun 2005.

2. Mekanisme Kegiatan Dinas Perkebunan

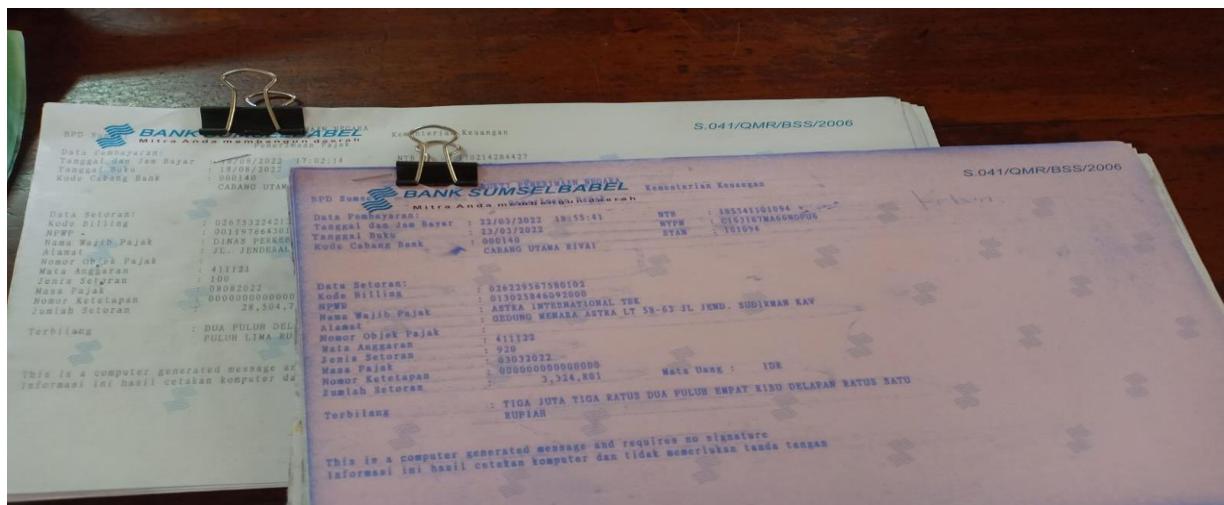
Kegiatan berikutnya adalah membantu pelaksanaan kerja pada Dinas Perkebunan seperti melaksanakan mekanisme Kegiatan Dinas Perkebunan meliputi :

- a. Membuat Surat Perjalanan Dinas

Mengerjakan pembuatan surat perjalanan dinas untuk surat izin perjalanan karyawan untuk dinas luar. sehingga surat tersebut sebagai pelengkap keterangan agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan efisien sesuai jadwal yang di tentukan .

- b. Menyusun Surat Pembayaran pajak dan SP2D

Berikut ini hasil menyusun kwintasi pembayaran pajak Dan SP2D.



Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 7-12
P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000
Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>



c. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Sampai dengan Realisasi

Dari bahan usulan pekerjaan yang diajukan sesuai keperluan penyusunan bahan – bahan penelitian untuk menyusun RKA . Rencana anggaran kemudian di ajukan . Setelah di setujui DPPKAD menerbitkan DPA dan petikan DPA di serahkan ke perangkat kerja untuk dilaksanakan perkerjaan nya berdasarkan pada yang tertuang DPA.

d. Laporan Realisasi Belanja

Berikut ini di sajikan Laporan Realisasi Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2020 dan 2021

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN									
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH									
periode 1 January s.d 31 December 2021									
KODE REKENING	URAIAN					REALISASI PERIODE LALU	REALISASI PERIODEINI	TOTAL	LEBIH / KURANG
5	BELANJA DAERAH								
5.1	BELANJA OPERASI								
5.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					0,00	15.013.251.536,60	15.013.251.536,60	(1.736.501.564,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok ASN					0,00	12.811.578.736,60	12.811.578.736,60	(1.707.275.611,00)
5.1.1.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					0,00	8.171.496.177,00	8.171.496.177,00	(502.180.821,00)
5.1.1.01.0002	Belanja Tunjangan Keharusan PNS					0,00	4.672.767.427,00	4.672.767.427,00	(289.449.573,00)
5.1.1.01.0003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					0,00	3.647.545.300,00	3.647.545.300,00	(178.522.798,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					0,00	3.647.545.300,00	3.647.545.300,00	(178.522.798,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					0,00	397.159.080,00	397.159.080,00	(26.017.929,00)
5.1.1.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					0,00	397.159.080,00	397.159.080,00	(26.017.929,00)
5.1.1.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					0,00	233.050.000,00	233.050.000,00	(7.644.000,00)
5.1.1.06.0001	Belanja Tunjangan Bantuan					0,00	233.050.000,00	233.050.000,00	(7.644.000,00)
5.1.1.06	Belanja Tunjangan Beras PNS					0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	(24.426.000,00)
5.1.1.06.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	(24.426.000,00)
5.1.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	(24.426.000,00)
5.1.1.07.0001	Belanja Pendidikan Gaji ASN					0,00	97.175.000,00	97.175.000,00	(6.536.000,00)
5.1.1.08	Belanja Pembentukan Gaji PNS					0,00	97.175.000,00	97.175.000,00	(6.536.000,00)
5.1.1.08.0001	Belanja Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN					0,00	209.076.540,00	209.076.540,00	(7.523.460,00)
5.1.1.12	Belanja Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					0,00	209.076.540,00	209.076.540,00	(7.523.460,00)
5.1.1.12.0001	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
5.1.1.02.03.0001	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.000,00	(13.695.640,00)
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					0,00	3.565.460.000,00	3.565.460.00	

KODE REKENING	URATAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBAR / MULAI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lanjinya ASN	146.000.000,00	0,00	118.560.000,00	118.560.000,00	(27.481.000)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	146.000.000,00	0,00	118.560.000,00	118.560.000,00	(27.481.000)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	140.640.000,00	0,00	113.200.000,00	113.200.000,00	(20.440.000)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.2.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.845.177.200,00	0,00	4.640.082.559,60	4.640.082.559,60	(1.205.094.640,00)
5.1.2.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.863.916.674,00	0,00	1.805.240.160,00	1.805.240.160,00	(58.676.515,00)
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bilir Tanaman	1.863.916.674,00	0,00	1.805.240.160,00	1.805.240.160,00	(58.676.515,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lanjut	317.760.000,00	0,00	317.288.800,00	317.288.800,00	(49.188,00)
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Alat Cading Alat Angkutan	40.000.000,00	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	0,00	49.977.200,00	49.977.200,00	(22.390,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.520.000,00	0,00	84.427.399,00	84.427.399,00	(92.601,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.448.474,00	0,00	151.023.561,00	151.023.561,00	(8.424.513,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi	20.000.000,00	0,00	71.040.000,00	71.040.000,00	(1.518.000,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.784.000,00	0,00	5.932.000,00	5.932.000,00	(14.068.000,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	66.290.000,00	0,00	66.172.500,00	66.172.500,00	(117.500,00)
5.1.2.01.01.0039	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Pendekatan	30.000.000,00	0,00	29.947.400,00	29.947.400,00	(57.600,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	853.006.200,00	0,00	845.496.200,00	845.496.200,00	(7.510.000,00)
5.1.2.01.01.0063	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.810.000,00	0,00	45.655.600,00	45.655.600,00	(24.154.400,00)
5.1.2.01.01.0070	Belanja Pakaihan Dinas Harian (PDH)	90.000.000,00	0,00	89.979.500,00	89.979.500,00	(20.500,00)
5.1.2.02	Belanja Pakaihan Pelatihan Kerja	7.500.000,00	0,00	7.480.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa					
5.1.2.02.01.0003	Belanja Jasa Kantor	2.329.220.000,00	0,00	1.348.566.231,60	1.348.566.231,60	(980.653.758,40)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembicara Acara, dan Panitia	2.259.220.000,00	0,00	1.281.402.282,60	1.281.402.282,60	(977.817.717,40)
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0026	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(880.000.000,00)
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Ahli	623.220.000,00	0,00	621.900.000,00	621.900.000,00	(1.320.000,00)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Tenaga Keharian	21.000.000,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	(5.600.000,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	0,00	119.637.000,00	119.637.000,00	(30.363.000,00)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Telepon	120.000.000,00	0,00	119.976.876,60	119.976.876,60	(23.127,60)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Air	45.000.000,00	0,00	39.471.896,00	39.471.896,00	(5.528,19)
	Belanja Tagihan Listrik	35.000.000,00	0,00	31.860.168,00	31.860.168,00	(3.139,81)
		185.000.000,00	0,00	175.817.867,00	175.817.867,00	(9.158,19)

Simpulan

Dari kegiatan magang yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, Dalam pelaksanaan magang mahasiswa mendapat wawasan tentang bagaimana Dinas Perkebunan melakukan kegiatan dibidang keuangan, bidang fungsional maupun bidang yang lain. Pengambilan data dan penginputan data. *Kedua*, dalam pelaksanaan magang mahasiswa mendapatkan kegiatan magang yang positif karena dengan kegiatan ini mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam dunia kerja dan memberikan pengalaman kerja dalam suasana dan kondisi di dunia kerja dalam Dinas Perkebunan. *Ketiga*, dalam pelaksanaan magang mahasiswa dapat belajar lebih teliti, profesional, bertanggung jawab, serta ulet dalam melakukan tugas di Dinas Perkebunan

Daftar Pustaka

<https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisisasi-anggaran/>

Data dari Dinas Perkebunan Privinsi Sumatera Selatan. <http://disbun.sumselprov.go.id/>
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.